

Model Pendidikan Politik Kebangsaan: Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta

Nursaiti^{1*}, Nasiwan²

^{1,2}Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri
Yogyakarta, Indonesia

*nursaiti0471fishipol.2023@student.uny.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the political education model used by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in Yogyakarta. This activity aims to build political awareness, active citizen, and responsible civil society. The low of political participation and high levels of abstention, making political education a transformative strategy for the party in strengthening local democracy. PDIP developed a model based on ideology, participatory, and national values through a structured approach from the central government to the regions. This study used a qualitative case study method with interview, documentation, and observation techniques. The results show that despite the implementation of cadre training and party schools, challenges remain, such as limited resources, weak ideological understanding, and a lack of innovation. Therefore, political education needs to be optimized contextually and sustainably. This study recommends strengthening cadre capacity and improving the quality of community-based programs.

Keywords: Civil society; Local democracy; Political parties; PDIP Yogyakarta City; Political education.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis model pendidikan politik yang digunakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun masyarakat sipil yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab secara politik. Partisipasi politik yang rendah dan tingkat golput yang tinggi, menjadikan pendidikan politik sebagai strategi transformatif bagi partai dalam memperkuat demokrasi lokal. PDIP mengembangkan model yang berbasis ideologis, partisipatif, dan nilai-nilai kebangsaan melalui pendekatan terstruktur dari pengurus pusat ke daerah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilaksanakan pelatihan kader dan sekolah partai, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman ideologis yang lemah, dan kurangnya inovasi. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu dioptimalkan secara kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kader dan peningkatan kualitas program berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Masyarakat sipil; Demokrasi lokal; Partai politik; PDIP Kota Yogyakarta; Pendidikan politik

Received: 24th July 2025

Revised: 15th August 2025

Accepted: 16th August 2025

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by the author(s).

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengekspresikan aspirasi, memilih pemimpin melalui mekanisme pemilihan umum dan memengaruhi arah kebijakan publik. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat dijadikan sebagai dasar yang menjamin bahwa kekuasaan negara digunakan untuk melayani kepentingan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi (Abdurahman *et al.*, 2024; Adlin, & Siregar, 2021; Fauzi & Ramdhan, 2024).

Jean-Jacques Rousseau (1987) merupakan salah satu tokoh utama dalam pengembangan gagasan kedaulatan rakyat. Dalam karyanya *The Social Contract*, Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan sejati bersumber dari *volonté générale* atau kehendak umum, yaitu kehendak kolektif rakyat yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu (Rousseau, 2017). Dalam pandangannya, rakyat merupakan sumber kekuasaan politik yang sah, dan kedaulatan hanya dapat dijalankan secara adil apabila kehendak umum rakyat dihormati dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan politik (Winarto, 2022). Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, melainkan sebagai landasan fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam berbagai aspek sosial, politik, dan budaya (Darussalam & Indra, 2021; Syafriadi & Santri, 2023).

Kedaulatan rakyat salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih wakil-wakilnya, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif (Yan, 2022; Proborini *et al.*, 2022). Setiap suara yang diberikan oleh rakyat tidak hanya merepresentasikan pilihan politik individu, tetapi juga menentukan arah masa depan bangsa melalui keputusan-keputusan strategis dalam penyelenggaraan negara (Kouba *et al.*, 2023; Sebayang *et al.*, 2025; Pamungka *et al.*, 2025). Partisipasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan banyaknya pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga mencerminkan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokrasi (Halawi *et al.*, 2024; Sudiasmo & Nofa, 2021; Sidiq, 2020).

Partisipasi politik di kalangan pemuda, cenderung bersifat pasif dan pragmatis, dengan tingkat keterlibatan substantif yang masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya pelaksanaan pendidikan politik, terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan, serta kuatnya pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas politik pemuda melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi merupakan

kebutuhan yang mendesak dalam rangka membangun partisipasi politik yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab (Ghasani & Nasiwan, 2022; Hardianto *et al.*, 2021; Mukaromah *et al.*, 2022). Fenomena apatisme politik, rendahnya literasi politik, dan meningkatnya angka golput dalam pemilu menunjukkan lemahnya kesadaran politik masyarakat (Nurhadi & Suyatno, 2022; Firdaus & Anam, 2020).

Partai politik pada saat sekarang ini lebih berfokus pada upaya memenangkan pemilu ketimbang memberikan pendidikan politik berkelanjutan. Akibatnya, kinerja partai politik dianggap kurang optimal dalam mencerdaskan warga negara dan menyiapkan kader-kader yang berkualitas. Menurut Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik hanya mencapai 54%, jauh di bawah kepercayaan terhadap TNI (98%), lembaga kepresidenan (85%), Polri (76%), dan KPK (74%).

Friedrich Hegel dalam karyanya *Philosophy of Right* memandang masyarakat madani sebagai fase penting dalam perkembangan negara, dimana individu berinteraksi dalam ruang sosial melalui kegiatan ekonomi, hukum, sosial, dan politik (Hegel, 2015). Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi, menghormati hak asasi manusia, berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan (Grande, 2022; Koisin & Melayaman, 2024; Setyawan *et al.*, 2024).

Jumlah masyarakat yang tidak berpartisipasi atau menjadi golongan putih (*golput*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum tiga dekade terakhir cenderung meningkat. Fenomena ini dirangkum dalam tabel di bawah:

Tabel. 1. *Persentase Angka Partisipasi dan Golongan Putih (GOLPUT) Pada Pemilihan Umum Tahun 1999-2024*

Tahun	Partisipasi (%)	Golput (%)	Jenis Pemilu
1999	92,6	7,4	Legislatif & Presiden
2004	84,1	15,9	Legislatif
	78,2 (putaran 1)	21,8	Pilpres
2009	76,6 (putaran 2)	23,4	Pilpres
	70,99 (pileg)	29,01	Legislatif
2014	71,7 (pilpres)	28,3	Pilpres
	75,11 (pileg)	24,89	Legislatif
2019	69,58 (pilpres)	30,42	Pilpres
	81,69 (pileg)	18,31	Legislatif
2024	81,97 (pilpres)	18,03	Pilpres
	81,42 (pileg)	18,58	Legislatif
	81,78 (pilpres)	18,22	Pilpres

Sumber: Hasil Olahan peneliti dari berbagai sumber, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1, terdapat kecenderungan peningkatan partisipasi dalam dua pemilu terakhir. Namun, dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024, berdasarkan data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (2025), tingkat golput tertinggi tercatat di Kota Yogyakarta, yakni sebesar 35 persen. Diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 25,49 persen, Kabupaten Sleman sebesar 23,43 persen, Kabupaten Bantul sebesar 22,35 persen, dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 20,74 persen.

Salah satu alasan utama di balik keputusan sebagian masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah sikap apatis terhadap proses politik dan pemilu. Tingginya angka golput di Kota Yogyakarta, dapat diinterpretasikan bahwa sebagian warga merasa terpinggirkan dari proses politik, atau memandang bahwa politik tidak memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui fungsi pendidikannya, partai politik diharapkan mampu menyediakan pendidikan politik yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis nilai (Firdaus, 2023; Sasmito, 2021; Laksana *et al.*, 2020).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia, memiliki infrastruktur kelembagaan yang kuat hingga ke tingkat daerah. Di Kota Yogyakarta, PDIP telah menginisiasi berbagai kegiatan pendidikan politik, seperti pelatihan kader, sekolah partai, serta penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pendidikan politik yang diterapkan oleh partai politik seharusnya tidak hanya menasar kader elit, tetapi juga menjangkau akar rumput dan memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Mietzner, 2021; Tamanaha, 2021; Wang *et al.*, 2021).

Artikel ini akan membahas bagaimana model pendidikan politik kebangsaan yang diterapkan oleh PDIP di Kota Yogyakarta dalam membangun masyarakat sipil? Artikel ini berlandaskan pada perspektif pendidikan kewarganegaraan kritis, yang mendorong warga negara untuk berpikir reflektif, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik (Banks, 2017; Sant, 2022; Thomson *et al.*, 2021). Pendidikan politik yang efektif di partai tidak hanya berdampak pada elektabilitas tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan budaya politik baru yang demokratis dan rasional (Afrianty, 2020; Gherghina *et al.*, 2021; Easton, 1965).

Penelitian ini memiliki relevansi terhadap pendidikan kewarganegaraan, karena menempatkan proses pendidikan politik dalam kerangka pengembangan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan kewarganegaraan yang baik harus mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam membentuk jati diri bangsa

dan tanggung jawab publik warga negara (Winataputra, 2021; Damaianti & Haryanto, 2023; Thomson *et al.*, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang model pendidikan politik nasional yang dikembangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses, makna, dan konteks pendidikan politik dari perspektif para aktor, baik di tingkat struktural partai maupun komunitas. Studi kasus, sebagai sebuah metode, memberikan kesempatan untuk mengkaji secara intensif suatu fenomena dalam ruang sosial yang spesifik, dinamis, dan kompleks (Creswell & Poth, 2018; Anggara & Pribadi, 2024; Kumala, 2022).

Objek penelitian ini adalah model pendidikan politik kebangsaan yang diterapkan oleh PDIP di Kota Yogyakarta, yang meliputi kegiatan sekolah partai, pelatihan kader ideologi, forum diskusi nasional, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik nonformal. Fokus utamanya adalah bagaimana partai menjalankan fungsi pendidikannya dalam membentuk warga negara yang demokratis, partisipatif, dan berwawasan kebangsaan. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara pendidikan politik yang diterapkan oleh partai dan penguatan masyarakat sipil di tingkat lokal. Oleh karena itu, metode ini relevan untuk menganalisis interaksi antara struktur partai, pengembangan kader ideologis, dan pembentukan kesadaran politik publik (Moleong, 2021).

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan seperti: pengurus DPC PDIP Kota Yogyakarta, kader partai di tingkat PAC dan ranting, serta anggota masyarakat peserta program pendidikan politik. Teknik wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terkait pelaksanaan pendidikan politik. Observasi dilakukan selama kegiatan pendidikan politik berlangsung untuk menangkap dinamika interaksi, strategi penyampaian materi, dan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri dokumen partai, materi pelatihan, dan publikasi terkait pendidikan politik kebangsaan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dengan peran yang berbeda dalam

struktur partai dan masyarakat. Triangulasi metode diterapkan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk menentukan konsistensi informasi dan memperkuat interpretasi data. Selanjutnya, peneliti melakukan pengecekan anggota dengan mengonfirmasi temuan dengan informan kunci untuk memastikan akurasi dan representasi data. Validitas temuan penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif, terutama untuk menghindari bias peneliti dalam menafsirkan fenomena sosial yang kompleks.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dicapai dengan memilih informasi kunci dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen. Data kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tematik, menghubungkan kategori berdasarkan teori pendidikan politik, kewarganegaraan kritis, dan pendekatan partisipatif. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan, dilakukan secara induktif, membangun konstruk teoritis dari temuan lapangan dan menghubungkannya dengan kerangka konseptual penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan praktik pendidikan politik tetapi juga memberikan wawasan kritis tentang kontribusinya dalam membangun warga negara yang demokratis di era transformasi sosial politik saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik sebagai Instrumen Kewarganegaraan Kritis

Pendidikan politik merupakan elemen krusial dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis. Dalam pendekatan kewarganegaraan kritis, pendidikan politik diposisikan sebagai alat untuk memberdayakan individu agar mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, kesadaran sosial, dan keberanian bertindak dalam memperjuangkan keadilan (Sant, 2022; Gewirtz & Cribb, 2020). Hal ini sejalan dengan perspektif Banks (2017) yang menekankan bahwa warga negara tidak hanya harus tunduk pada hukum dan peraturan, tetapi juga harus berani menentang struktur yang tidak adil. Oleh karena itu, pendidikan politik harus bersifat reflektif dan dialogis, bukan dogmatis atau indoktrinatif.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan politik adalah bagaimana melibatkan kesadaran politik publik secara substansial, bukan hanya pada tingkat yang dangkal. Banyak program pendidikan politik di Indonesia hanya berhenti pada aspek penjangkauan atau sosialisasi menjelang pemilu, tanpa menyediakan ruang yang memadai untuk dialog antara peserta dan fasilitator (Firdaus, 2023; Clarke, 2020). Akibatnya, warga negara kurang

berkesempatan untuk mengembangkan pemahaman kritis terhadap isu-isu politik, termasuk isu-isu struktural yang menghambat partisipasi politik.

Pendekatan pendidikan kewarganegaraan kritis sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam pendidikan politik. Pendekatan ini mendorong warga negara untuk merefleksikan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas politik dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses demokrasi (Winataputra, 2021; Creswell, 2017). Pendidikan politik tidak hanya memperkuat fungsi demokrasi elektoral tetapi juga merevitalisasi demokrasi substantif di ruang publik.

Pendidikan politik juga berperan dalam menumbuhkan sikap toleran dan dialogis di antara warga negara. Hal ini krusial dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, dimana perbedaan identitas dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Pendidikan politik yang memadukan unsur pendidikan multikultural dan antikekerasan dapat membangun kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan secara damai (Damaianti & Haryanto, 2023; Zhelnina, 2020).

Pendidikan politik juga memiliki dimensi pemberdayaan. Menurut Sant (2022), pendidikan politik hendaknya membentuk warga negara dengan kesadaran politik progresif, yaitu kesadaran yang mendorong perubahan sosial yang adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, partai politik, sebagai penyelenggara pendidikan politik, perlu mengadopsi pendekatan transformatif yang memadukan dimensi kognitif, afektif, dan praktis dalam kegiatannya.

Fungsi Pendidikan Partai Politik dalam Kerangka Demokrasi Substantif

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memiliki dua fungsi utama: sebagai instrumen mobilisasi elektoral dan sebagai agen pendidikan politik. Pendidikan politik ini memainkan peran krusial dalam membentuk pemilih yang rasional dan memperkuat legitimasi demokrasi (Afrianty, 2020; Zymová, 2024; Havlíček, 2020). Pada praktiknya, sebagian besar partai politik di Indonesia menyediakan pendidikan politik formal dan temporer, yaitu: menjelang pemilihan umum dengan fokus terbatas pada kepentingan elektoral. Hal ini melemahkan peran strategis pendidikan politik, yang seharusnya esensial namun tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi substantif.

Beberapa partai politik di Indonesia, seperti PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, dan Demokrat, telah mengembangkan program pengembangan kader melalui model Sekolah Politik Kader yang dilaksanakan secara berkala dan bertahap. Program ini mencakup kurikulum pelatihan yang luas dan relevan, meliputi sejarah perjuangan bangsa, etika kepemimpinan, dasar-dasar ketatanegaraan, komunikasi politik, dan keterampilan advokasi kebijakan

publik. Kurikulum ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan literasi politik tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran ideologis dan tanggung jawab sosial kader terhadap masyarakat.

Metode pembelajaran yang diterapkan dalam program ini bersifat partisipatif dan berbasis masalah yang dapat mendorong kader untuk terlibat aktif dalam mengkaji isu-isu sosial politik kontemporer dan membiasakan mereka dengan teori-teori politik. Pendekatan ini memberikan ruang bagi kader untuk mengembangkan pemahaman kritis, kemampuan analisis, dan kapasitas reflektif terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan berdemokrasi. Integrasi antara dimensi ideologis, teknokratis, dan partisipatif diyakini mampu menghasilkan kader partai yang tidak hanya kompeten secara intelektual dan teknis, tetapi juga memiliki komitmen ideologis yang kuat dan kepekaan terhadap aspirasi rakyat dan tantangan nasional.

Tabel 2. Model Pendidikan Politik Pada Lima Partai Politik Besar di Indonesia

Partai Politik	Model Pendidikan Politik	Deskripsi
PDIP	Transformasional & Kognitif-Reflektif	Membangun kesadaran ideologis, kepemimpinan politik lokal-nasional, dan komitmen kebangsaan
Golkar	Indoktrinatif-Partisipatif	Mencetak teknokrat dan fungsionaris partai dengan loyalitas tinggi dan efisiensi kerja.
Gerindra	Indoktrinatif-Transformasional	Membangun militansi kader dan pemimpin kuat, terpusat pada figur Bapak Prabowo
Nasdem	Kognitif-Reflektif & Transformasional	Kader intelektual, milenial, dengan fokus pada restorasi sistem demokrasi substansial
Demokrat	Indoktrinatif & Partisipatif	Pembentukan loyalis partai, pemimpin muda yang adaptif terhadap isu nasional dan global.

Sumber: Hasil Olahan peneliti dari berbagai sumber, 2025

Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam dinamika politik multipartai di Indonesia, model pendidikan politik kebangsaan yang diterapkan oleh masing-masing partai politik memiliki karakteristik yang beragam. Model-model ini tidak hanya mencerminkan orientasi ideologis partai, tetapi juga mencerminkan pendekatan strategis partai dalam mengembangkan warga negara yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi ideologis. Setiap partai politik menjanjikan pendekatan pendidikan politik yang berbeda, yang secara umum

dapat diklasifikasikan ke dalam empat model utama: indoktrinasi, partisipatif, kognitif-reflektif, dan transformasional.

Para pemimpin partai, dalam proses pembentukan kader, berfungsi sebagai agen transformasional, menumbuhkan visi kolektif, memotivasi kader untuk berkontribusi pada pembangunan nasional dan menumbuhkan kesadaran politik reflektif. Gaya kepemimpinan ini terbukti relevan dalam memperkuat identitas politik kader di tengah tantangan globalisasi politik (Bass & Riggio, 2006; Hamid & Andriyani, 2023). Pendidikan kritis memungkinkan proses penyadaran, yaitu pengembangan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural dan pentingnya perubahan sosial-politik kolektif (Suharto, 2022; Held, 2019). Tahapan pengembangan kader, mulai dari pengenalan ideologi dan studi kasus hingga praktik politik praktis, mencerminkan model pendidikan yang secara bertahap memupuk keterampilan berpikir strategis dan reflektif. Kegiatan-kegiatan ini memungkinkan kader untuk mengembangkan pemahaman politik dan keterampilan advokasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, pengembangan kader hanya menjadi agenda seremonial atau formalitas administratif menjelang pemilu, tanpa memberikan pendidikan politik yang substansial dan transformatif. Fenomena ini sering ditemukan pada partai-partai yang lebih berorientasi pragmatis daripada ideologis (Kadyrzhanov, 2024; Kartodirdjo, 1962). Program kader yang dirancang dan diimplementasikan secara cermat dapat berfungsi sebagai laboratorium yang efektif untuk pendidikan politik. Dalam konteks ini, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan politik yang secara aktif membentuk warga negara yang demokratis.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta merupakan salah satu partai yang berupaya menerapkan fungsi pendidikan ini secara lebih serius melalui sekolah partai dan pelatihan kader. Program-program ini tidak hanya menekankan aspek elektoral tetapi juga mengutamakan ideologi Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, dan kesadaran sosial-politik masyarakat. Hal ini menunjukkan pendekatan transformasional terhadap model pendidikan politik yang dikembangkan oleh partai ini (Mietzner, 2021; Kurki, 2020). Pendekatan transformasional ini berbeda dari pendekatan hierarkis dan dogmatis tradisional dengan menekankan hubungan dialogis antara kader dan struktur partai.

Menurut Dryzek (2022), partai politik yang menerapkan pendidikan politik berbasis dialog dan partisipasi berpotensi menghasilkan kader yang lebih reflektif dan kritis terhadap isu-isu kebijakan publik. Hal ini krusial mengingat pemimpin politik yang lahir dari proses pendidikan substantif cenderung

memiliki komitmen ideologis dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pendidikan politik tidak boleh diposisikan hanya sebagai alat mobilisasi, tetapi harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengembangkan pemimpin yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai.

Pendidikan partai juga mencakup pemberdayaan politik masyarakat akar rumput. Kegiatan pendidikan politik yang masif di tingkat kecamatan, desa, dan RT/RW dapat menciptakan peluang bagi warga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dekat tentang proses politik. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan politik kontekstual, yaitu pendidikan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika sosial lokal (Firdaus, 2023; Liropoulos, 2020; Lingard, 2020). Dalam kerangka ini, PDIP Kota Yogyakarta dapat menjadi contoh bagi partai lain dalam mengembangkan model pendidikan politik berbasis masyarakat.

Namun, pelaksanaan fungsi pendidikan partai politik masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitator berkualitas, hingga lemahnya pengawasan internal partai terhadap pelaksanaan program. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program pendidikan politik diperlukan, serta pelibatan aktor eksternal seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perancangan dan pelaksanaan program.

Pendidikan Politik dan Penguatan *Civil Society* di Tingkat Lokal

Pendidikan politik memainkan peran sentral dalam penguatan masyarakat sipil, khususnya di tingkat lokal. Masyarakat sipil, dalam konteks ini, merujuk pada ruang sosial di dalam lembaga-lembaga di luar negara tempat kepentingan warga negara bertemu untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan hak-hak mereka (Hadiz & Robison, 2017). Dalam masyarakat demokratis, masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas negara dan sumber inovasi sosial dalam proses demokratisasi. Namun, keberhasilan masyarakat sipil sangat bergantung pada tingkat kesadaran politik dan kapasitas berpikir kritis warga negara yang membentuknya (Diamond, 2020; Melsi, 2022).

Model pendidikan politik yang dikembangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta, yang meliputi pelatihan kader, diskusi ideologis, dan pemberdayaan masyarakat melalui sekolah partai, menunjukkan kontribusi langsung dalam membangun masyarakat sipil lokal. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat kader partai tetapi juga membangun jaringan sosial-politik yang lebih luas di dalam masyarakat. Kader yang terlatih dapat berperan sebagai penggerak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mengendalikan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, pendidikan politik menjadi instrumen transformasi sosial yang nyata (Chornelia dkk., 2023; Sari, 2023; Usman Betan & Nugroho, 2021).

Pendidikan politik juga dapat meningkatkan daya pikir kritis masyarakat terhadap isu-isu publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Misalnya, isu kemiskinan, pengelolaan anggaran daerah, atau buruknya pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan konsep ruang publik Habermas, di mana wacana publik berfungsi sebagai alat untuk membentuk opini kolektif yang rasional dan bermakna (Febriani, 2025; Dryzek, 2022; Sulastri, Hariyadi & Simarmata, 2020).

Keberadaan masyarakat sipil di tingkat lokal juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan elit politik pusat. Dengan warga negara yang terdidik secara politik, potensi perlindungan kekuasaan oleh elit lokal dapat dikurangi, dan proses akuntabilitas publik dapat lebih efektif. Hal ini relevan dalam menjawab tantangan demokrasi lokal di Indonesia, yang masih menghadapi permasalahan oligarki dan politik patronase.

Namun, tantangannya di PDIP Yogyakarta adalah bagaimana menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara sosial dan politik, seperti: kelompok miskin, perempuan, dan pemuda. Berikut ini analisis temuan penelitian implementasi model pendidikan politik kebangsaan oleh PDIP di Kota Yogyakarta, berdasarkan kegiatan yang terdokumentasi:

Strategi Pendidikan Politik Kebangsaan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta mengembangkan strategi pendidikan politik kebangsaan yang transformatif dan partisipatif. Berdasarkan temuan lapangan, kegiatan pendidikan politik dikemas melalui sekolah partai, pelatihan kader, forum ideologisasi, dan pendidikan informal terstruktur. Partai mengembangkan kurikulum internal yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, sejarah perjuangan bangsa, Pancasila, dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Kegiatan-kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan politik tetapi juga untuk membentuk karakter dan etika politik para kader. Pendekatan ini selaras dengan model pendidikan kewarganegaraan kritis yang dikembangkan oleh Banks (2017), yang menyatakan bahwa pendidikan politik yang efektif harus membekali warga negara dengan kemampuan menganalisis struktur kekuasaan dan menanamkan nilai-nilai keadilan sosial. PDIP Kota Yogyakarta juga mengadopsi pendekatan desentralisasi dalam pendidikan politik. Kegiatan dilakukan tidak hanya di kantor DPC, tetapi juga di tingkat PAC dan komunitas, bahkan di dalam kelompok masyarakat. Strategi ini selaras dengan konsep pembelajaran

kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu pembelajaran politik berbasis komunitas dan pengalaman langsung (Winataputra, 2021).

Partai ini juga berupaya membangun narasi ideologis yang kuat sebagai bagian dari pendidikan politiknya. Narasi yang dikembangkan tidak hanya merujuk pada identitas partai sebagai kelanjutan perjuangan Bung Karno, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu kontemporer seperti demokratisasi digital, ketimpangan sosial, dan krisis iklim. Secara keseluruhan, strategi pendidikan politik PDIP Kota Yogyakarta mencerminkan kombinasi pendekatan ideologis, praktis, dan kontekstual. Strategi ini memberikan ruang bagi penguatan identitas, kebangsaan, keterlibatan sipil, dan pengembangan karakter kader yang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Pendidikan Politik PDIP Kota Yogyakarta
Sumber: Portal web DPC PDIP Kota Yogyakarta

Dinamika Pengembangan Kader sebagai Sarana Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan

Hasil penelitian pendidikan politik yang dilakukan oleh PDIP Yogyakarta menunjukkan bahwa proses pengembangan kader terbagi dalam tiga tahap utama: rekrutmen kader secara ideologis, pelatihan kepemimpinan, dan penguatan wawasan kebangsaan. Proses ini berlandaskan pada prinsip ideologisasi kader, pembinaan kesetiaan kepada Pancasila, semangat antikolonial, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Pengembangan kader berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai persahabatan melalui diskusi kelompok, studi literatur, dan simulasi kebijakan publik. Pembentukan kader melalui proses intensif ini mencerminkan prinsip pendidikan transformatif, yang mendorong perubahan kesadaran peserta. Transformasi kesadaran (transformasi perspektif) hanya dapat terjadi ketika peserta mengalami ketegangan antara pengalaman mereka dan nilai-nilai yang diajarkan. Dalam hal

ini, PDIP menyediakan ruang untuk refleksi kritis, evaluasi diri, dan pertukaran pengalaman politik, yang semuanya berkontribusi pada penguatan orientasi kebangsaan para kader.

Internalisasi nilai persahabatan juga dilakukan oleh PDIP Yogyakarta melalui kegiatan nonformal seperti pelatihan komunitas, advokasi lingkungan, dan pendampingan UMKM. Kegiatan ini tidak hanya memperluas makna kaderisasi ke ranah praktik sosial, tetapi juga mentransformasikan kader menjadi aktor konstruktif dalam konteks lokal. Model ini selaras dengan prinsip keterlibatan warga negara dalam pendidikan kewarganegaraan.

Proses kaderisasi PDIP Kota Yogyakarta memperkaya teori yang sudah ada bahwa konsep kompetensi kewarganegaraan, yaitu kombinasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara bermakna bagi kehidupan demokrasi. Pelatihan kurikulum yang dilakukan mencakup isu-isu hak asasi manusia, etika politik, komunikasi publik, dan ideologi Pancasila, menekankan bahwa pendidikan politik partai tidak hanya teoretis tetapi juga praktis. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan kader dengan keterampilan politik dan kesadaran sosial yang kuat (Winataputra, 2021).



Gambar 2. Kader PDIP di depan Sekolah Partai DPP PDIP Yogyakarta
Sumber: portal web DPC PDIP Kota Yogyakarta

Pendidikan Politik sebagai Penguatan *Civil Society* Lokal

Pendidikan politik oleh PDIP di Kota Yogyakarta telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan masyarakat sipil di tingkat lokal. Melalui pelibatan masyarakat dalam forum warga, pelatihan advokasi, dan kegiatan sosial budaya berbasis komunitas. Dalam program "Ngopi Bareng Rakyat", partai ini mengadakan diskusi publik tentang isu-isu terkini seperti pengelolaan dana desa, perubahan iklim, dan ketimpangan pembangunan. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan bentuk musyawarah publik yang memperkuat budaya demokrasi partisipatif dan menunjukkan bahwa

pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk memperkuat partai secara internal, tetapi juga berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran politik publik dan mengembangkan kapasitas warga negara untuk mengartikulasikan kepentingan kolektif mereka (Hadiz & Robison, 2017).

Banyak peserta kemudian menjadi aktivis lokal, aktif dalam forum RT, pengurus Karang Taruna, dan terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Transformasi ini memperkuat teori pemberdayaan sipil, yang menyatakan bahwa pendidikan politik partisipatif mendorong kesadaran kritis dan aksi warga dalam sistem demokrasi (Chornelia dkk., 2023).

Namun, masih terdapat kendala dalam memperkuat masyarakat sipil melalui pendidikan politik, seperti terbatasnya akses informasi di kalangan masyarakat terpinggirkan, kurangnya fasilitator yang berkualitas, dan tantangan yang terus berlanjut berupa budaya politik berbasis patronase. Partai politik perlu berinovasi dan memperluas jangkauannya untuk menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam proses politik. Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPD PDIP Kota Yogyakarta tidak hanya melahirkan aktor partai yang loyal dan ideologis, tetapi juga memperkuat masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem politik lokal. Partai ini telah memainkan peran strategis sebagai fasilitator demokrasi substantif melalui pendekatan pendidikan politik yang menyentuh akar permasalahan sosial masyarakat.



Gambar 3. Diskusi Publik DPC PDIP dengan Masyarakat
Sumber: portal web DPC PDIP Kota Yogyakarta

Evaluasi Efektivitas Model Pendidikan Politik Partai

Evaluasi efektivitas model pendidikan politik yang diterapkan PDIP di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan transformasional yang digunakan cukup berhasil dalam membangun kader yang sadar politik dan masyarakat. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi,

banyak kader menunjukkan peningkatan pemahaman politik, keterampilan advokasi, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai forum kebijakan publik, pemilihan legislatif, dan kegiatan sosial.

Kriteria yang diidentifikasi untuk keberhasilan pendidikan politik mencakup tiga aspek utama: (1) peningkatan pengetahuan politik dan ideologis; (2) pengembangan sikap politik reflektif; dan (3) perilaku partisipatif di ruang publik. Pendidikan politik PDIP Kota Yogyakarta memenuhi dimensi-dimensi tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan. Namun, efektivitas model pendidikan politik ini belum sepenuhnya merata di seluruh jenjang struktur partai. Di beberapa PAC dan partai politik, kegiatan pendidikan politik masih bersifat seremonial dan kurang refleksi kritis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya modul pelatihan yang adaptif, dan dominasi elit lokal yang menghambat partisipasi kader muda.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis digital belum dikembangkan secara optimal. Potensi media sosial dan platform sebagai ruang belajar politik belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, partai perlu mengembangkan literasi digital di kalangan kader dan menciptakan konten politik yang edukatif, menarik, dan mudah diakses. Efektivitas model pendidikan politik PDIP Kota Yogyakarta menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat tantangan internal dan eksternal yang perlu ditangani secara strategis. Sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat diperlukan agar proses pendidikan politik dapat menjadi instrumen perubahan berkelanjutan dalam kehidupan politik lokal.

Relevansi Model Pendidikan Politik dengan Pendidikan Kewarganegaraan

Model pendidikan politik kebangsaan yang dikembangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Yogyakarta selaras dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan (PKn), khususnya dalam konteks pengembangan warga negara yang demokratis, kritis, dan aktif. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan, watak kewarganegaraan, dan keterlibatan kewarganegaraan pada siswa, sehingga mereka dapat berpartisipasi sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dalam hal ini, model PDIP menunjukkan bagaimana konsep Pendidikan Kewarganegaraan diterapkan dalam konteks politik praktis dan komunitas nyata (Winataputra, 2021).

Kegiatan seperti pelatihan ideologi, diskusi publik, dan advokasi sosial dalam program pendidikan politik serupa dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Model pendidikan

politik praktis ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kesadaran kewarganegaraan yang autentik, konsisten dengan kerangka kerja pendidikan kewarganegaraan kontemporer (Banks, 2017). Melalui kurikulum ideologi partai, peserta didik memperoleh pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dalam politik, menghormati keberagaman, dan membangun solidaritas sosial. Nilai-nilai ini merupakan bagian dari profil siswa Pancasila, yang kini menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum nasional.

Model pendidikan partai politik juga menjawab tantangan politik elektoral yang cenderung transaksional dan elitis. Dengan membangun landasan ideologis bagi kader dan komunitas warga negara yang sadar politik, partai dapat menentukan arah politik elektoral menuju substansi demokrasi yang lebih terlindungi secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat berfungsi sebagai koreksi terhadap distorsi demokrasi dan melengkapi sistem pendidikan formal dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bermasyarakat. Model pendidikan politik yang diterapkan PDIP Kota Yogyakarta tidak hanya relevan untuk memperkuat struktur partai, tetapi juga berdampak luas pada pengembangan pendidikan kewarganegaraan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan politik kebangsaan yang diselenggarakan oleh PDIP Kota Yogyakarta berperan krusial dalam membentuk kesadaran politik warga negara dan memperkuat praktik demokrasi di tingkat lokal. Model pendidikan politik yang dikembangkan mencerminkan pendekatan transformasional yang menggabungkan pembentukan ideologi, penguatan nilai-nilai kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat secara praktis.

Strategi pendidikan politik PDIP di tingkat lokal ini dilakukan melalui pengembangan kader ideologi dan pelibatan masyarakat dalam forum politik non-formal. Pendidikan politik ini tidak hanya berfokus pada penguatan internal partai, tetapi juga berfungsi sebagai wahana untuk membangun ruang publik yang inklusif dan reflektif. Kegiatan-kegiatan seperti sekolah partai, diskusi publik, dan pelatihan advokasi kebijakan memberikan kesempatan belajar politik berkontribusi pada pembangunan budaya demokrasi yang partisipatif dan beradab. Temuan-temuan ini juga menunjukkan bahwa partai politik, jika dikelola secara ideologis dan partisipatif, dapat mengoreksi distorsi prosedur demokrasi yang selama ini cenderung transaksional. Dengan mengedepankan pendekatan deliberatif dan pendidikan politik berbasis masyarakat, PDIP Kota

Yogyakarta telah berhasil mendorong masyarakat menjadi aktor politik yang mandiri, kritis, dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa.

Relevansi model pendidikan politik PDIP dengan pendidikan kewarganegaraan juga sangat jelas, terutama dalam dimensi penguatan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan demokrasi lokal. Pendidikan politik yang dilaksanakan partai ini bukan sekadar proses pembelajaran politik bagi kader dan pendukungnya, tetapi juga merupakan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Model ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan kontekstual di luar lembaga formal.

Pendidikan politik kebangsaan yang dilaksanakan oleh PDIP Kota Yogyakarta merupakan praktik baik yang dapat direplikasi oleh partai politik lain sebagai kontribusi bagi pembangunan demokrasi yang lebih substantif. Namun, terdapat kritik yang dapat dilakukan oleh penelitian selanjutnya, yaitu: meskipun telah ada pelatihan kader, tantangan seperti sumber daya yang terbatas dan pemahaman ideologis yang lemah masih ditemukan pada kader.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, H., Purnamawati, N., & Oktaviani, T. N. (2024). Digitisasi pemilihan kepala desa melalui e-voting di Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Reformasi*, 14(1). <https://doi.org/10.33366/rfr.v14i1.5230>
- Adlin, & Siregar, J. F. (2021). Partisipasi politik mahasiswa Kota Pekanbaru terkait dukungan presiden dalam pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2019. *Reformasi*, 11(1). <https://doi.org/10.33366/rfr.v11i1.2191>
- Afrianty, D. (2020). *Partai Politik dan Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Elektoralitas dan Ideologi*. *Jurnal Politik Indonesia*, 7(1), 45–62.
- Ahmady, I., Rasanjani, S., & Putri, A. (2024). Penyediaan Platform Digital dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula Demi Sukses Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7, 125–135. <https://doi.org/10.31960/caradde.v7i1.2472> E-Journal Hamzanwadi
- Anggara, R., & Pribadi, U. (2024). Community participation in village deliberations: Examining the dynamics of influencing factors. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 8(1), 85–95. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.78113>
- Bächtiger, A., & Dryzek, J. S. (2024). *Deliberative democracy for diabolical times: confronting populism, extremism, denial, and authoritarianism*. Cambridge University Press

- Banks, J. A. (Ed.). (2017). *Citizenship Education and Global Migration: Implications for Theory, Research, and Teaching*. American Educational Research Association. <https://doi.org/10.4119/jsse-3234> JSTOR+5jsse.org+5SAGE Journals+5
- Chornelia, R., Lestari, S., & Yoei, H. (2023). *Peran Pendidikan Politik Partai dalam Membangun Civil Society Lokal di Yogyakarta*. *Jurnal Ilmu Politik & Pendidikan*, 12(2), 78–95.
- Clarke, J. (2020). A sovereign people?: Political fantasy and governmental time in the pursuit of Brexit. In M. Guderjan, H. Mackay, & G. Stedman (Eds.), *Contested Britain: Brexit, austerity and agency* (pp. 117–130). Bristol University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvz938gw.14>
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Darussalam, F. I., & Indra, A. B. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 189-204. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a2>
- Damaianti, V., & Haryanto, B. (2023). *Integrasi Pendidikan Politik dan Multikulturalisme di Ruang Publik*. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(4), 210–228.
- Darajat, D. M., & Muhtadi, M. (2020). Strategi Literasi Politik Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Sosio Informa*, 6(3), 305–317. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2422> E-Journal Hamzanwadi
- Dinie Anggraeni Dewi & Solihin Ichas Hamid, et al. (2023). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mewujudkan Identitas dan Integritas Nasional. *Jurnal Basicedu*, 5(6). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1607> Journal Upgripnk+4JBasic+4E-Journal Undiksha+4
- Dryzek, J. S. (2019). The crisis of democracy and the science of deliberation. *Science*, 363(6432), 1144–1146. <https://doi.org/10.1126/science.aaw2694> delibdemjournal.org+2delibdem+2Wikipedia+2
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. University of London.
- Fauzi, E., Noor, H. T., & Ramdhan, F. A. (2024). Konsep partisipasi publik yang bermakna sebagai pencegahan gejala *autocratic legalism* di Indonesia. *Reformasi*, 14(1). <https://doi.org/10.33366/rfr.v14i1.4455>
- Febriani, R., Supartiningsih, S., & Tjahyadi, S. (2025). Jurgen Habermas's views on legal validity and discourse ethics: A literature review. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 20-31.

- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi*, 10(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Gewirtz, S., & Cribb, A. (2020). Can teachers still be teachers?: The near impossibility of humanity in the transactional workplace. In A. Brown & E. Wisby (Eds.), *Knowledge, policy and practice in education and the struggle for social justice: Essays inspired by the work of Geoff Whitty* (pp. 217–232). UCL Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv13xpshq.21>
- Gherghina, S., Saikkonen, I., & Bankov, P. (2021). Dissatisfied, uninformed or both? Democratic satisfaction, political knowledge and the acceptance of clientelism in a new democracy. *Democratization*, 29(2), 211–231. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1947250>
- Ghasani, S. A., & Nasiwan, N. (2022). Pendidikan politik dan partisipasi politik anggota Karang Taruna pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 (Studi kasus di Desa Daleman). *AGORA*, 11(3), 296–310.
- Hadiz, V., & Robison, R. (2017). Islamism and the rise of civil society in Indonesia. *Journal of Democracy*, 28(3), 76–90.
- Halawi, I., Salloukh, B. F., & Clark, J. A. (2024). Radical movement-parties, political change and the epistemology of elections: Evidence from Lebanon. *Democratization*, 31(7), 1442–1464. <https://doi.org/10.1080/13510347.2024.2317271>
- Hardianto, W. T., Fithriana, N., & Rohman, A. (2021). Model complaint mechanism dalam pelayanan publik pemerintah daerah. *Reformasi*, 11(1). <https://doi.org/10.33366/rfr.v11i1.2252>
- Havlíček, P. (2020). *The EU's lessons for supporting civil society in member states. German Marshall Fund of the United States*. <http://www.jstor.org/stable/resrep25034>
- Held, D. (2019). *Democracy and the global order: From the modern state to cosmopolitan governance*. Polity Press.
- Hegel, G. W. F. (2015). *The philosophy of right*. Hackett Publishing.
- Jessen, M. H. (2021). Civil society in the shadow of the neoliberal state: Corporations as the primary subjects of (neoliberal) civil society. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 34(2), 161–174. <https://www.jstor.org/stable/48770371>
- Kadyrzhanov, R. (2024). Party system formation in Kazakhstan: Between formal and informal politics. *Central Asian Survey*, 33(2), 291–293. <https://doi.org/10.1080/02634937.2014.884736>

- Kumala, D. A. R. (2022). Strategi pengembangan sumber daya manusia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2), 254–261. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.50493>
- Kartodirdjo, S. (1962). Some problems on the genesis of nationalism in Indonesia. *Journal of Southeast Asian History*.
- Koisin, E., & Melayaman, M. (2024). Penanggulangan kemiskinan berdasarkan model *collaborative governance* pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *Reformasi*, 14(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v14i2.6392>
- Kouba, K., & Lysek, J. (2023). *The return of silent elections: Democracy, uncontested elections, and citizen participation in the Czech Republic*. *Democratization*, 30(8), 1527–1551. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2246148>
- Kurki, M. (2020). *Democracy and conceptual contestability: Reconsidering conceptions of democracy in democracy promotion*. *International Studies Review*, 12(3), 362–386. <http://www.jstor.org/stable/40931113>
- Laksana, T. O. P., Al-Hamidi, R., & Gusmi, A. D. (2020). Politisasi isu pribumi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 di media sosial. *Reformasi*, 10(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1870>
- Liaropoulos, A. (2020). *A social contract for cyberspace*. *Journal of Information Warfare*, 19(2), 1–11. <https://www.jstor.org/stable/27033617>
- Lingard, B. (2020). The policy sociology of Geoff Whitty: Current and emergent issues regarding education research in use. In A. Brown & E. Wisby (Eds.), *Knowledge, policy and practice in education and the struggle for social justice: Essays inspired by the work of Geoff Whitty* (pp. 165–178). UCL Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctv13xpshq.18>
- Melsi, Y. (2022). Gaya kepemimpinan general manager terhadap loyalitas karyawan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(1), 147–152. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.34574>
- Mietzner, M. (2025). The limits of autocratisation in Indonesia: power dispersal... *Third Reference. Political Studies*. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>
- Meiliana Putri, C., & Supatmi, S. (2020). Pengaruh dewan terkoneksi politik terhadap tingkat simpanan, tingkat kredit dan risiko kredit perbankan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 4(2), 158–168. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i2.31587>
- Mukaromah, K., Alfidaus, L. K., & Fitriyah. (2022). Politik keluarga dan pola rekrutmen partai politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten

- Banyuwangi tahun 2020. *Reformasi*, 12(1).
<https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3305>
- Pamungkas, G. I., & Puspitasari, M. (2025). Membangun ketahanan pemuda berbasis modal sosial dalam mencegah penyalahgunaan narkoba: Studi tiga SMA di Jakarta Selatan. *Reformasi*, 15(1).
<https://doi.org/10.33366/rfr.v15i1.6798>
- Proborini, A. B., & Nurhidayati. (2022). Komunikasi dan peranan KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan serentak 2020. *Reformasi*, 12(1). <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.2838>
- Rousseau, J. J. (2017). *The social contract and the first and second discourses*. Yale University Press.
- Sasmito, N. B. C. (2021). Peranan gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Reformasi*, 11(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v11i2.2866>
- Sant, S. C. (2025). Exploring the implementation gap in citizenship education: a postcolonial perspective. *Journal of Social Science Education*, (forthcoming).
- Sari, Y. O. (2023). Pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan Daima Hotel Padang. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 7(1), 150–154. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.38867>
- Sebayang, M. F., Katimin, & Syahminan, M. (2025). Peran dan pengaruh tokoh agama dalam membentuk perilaku politik masyarakat: Studi kasus partisipasi politik di Kabupaten Simalungun. *Reformasi*, 15(1).
<https://doi.org/10.33366/rfr.v15i1.6718>
- Setyawan, I., Umam, A. H., & Khopipah, S. (2024). Penggunaan pantun dalam komunikasi politik: Studi kasus kampanye & debat Pilgub Jakarta 2024–2029. *Reformasi*, 14(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v14i2.6457>
- Sidiq, R. S. S. (2020). Model pemberdayaan komunitas adat terpencil dalam meringankan kemiskinan. *Reformasi*, 10(2).
<https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1954>
- Sudiasmo, F., & Nofa, Y. D. H. (2021). Model konservasi berbasis masyarakat dalam desa wisata di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang. *Reformasi*, 11(1).
<https://doi.org/10.33366/rfr.v11i1.1992>
- Sulastri, S., Hariyadi, & Simarmata, M. Y. (2020). Nilai pendidikan karakter kerja keras dalam novel *Tentang Kamu* karya Tere Liye. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 4(1), 43–50.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24336>

- Syafriadi, & Santri, S. H. (2023). Analisis peran Badan Pengawas Pemilu dalam penegakan hukum Pemilu. *Reformasi*, 13(1). <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>
- Tamanaha, B. Z. (2021). *The rule of law: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Thomson, H., Buhaug, H., Urdal, H., & Rosvold, E. (2021). Group organization, elections and urban political mobilization in the developing world. *Democratization*, 28(8), 1525-1544. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1944117>
- Usman Betan, N. A., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 133-139. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>
- Yan, H. T. (2022). *The road to durable democracy: Dominant party regimes, party politics and democratic survival*. *Democratization*, 29(8), 1496-1517. <https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2085253>
- Wang, W.-T., & Lin, Y.-L. (2021). *The relationships among students' personal innovativeness, compatibility, and learning performance: A social cognitive theory perspective*. *Educational Technology & Society*, 24(2), 14-27. <https://www.jstor.org/stable/27004928>
- Winarto, A. E., Huda, H. M. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu 2019. *Reformasi*, 12(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3742>
- Winarno. (2014). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *EDUKATIF : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Willis, R., Curato, N., & Smith, G. (2022). Deliberative democracy and the climate crisis. *WIREs Climate Change*, 13(4), e759. <https://doi.org/10.1002/wcc.759> wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.759
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan dan muatan pendidikan Pancasila dalam konteks sistem pendidikan nasional. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15-36. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i1.1184> scholar.google.com
- Zheltnina, A. (2020). *The apathy syndrome: How we are trained not to care about politics*. *Social Problems*, 67(2), 358-378. <https://www.jstor.org/stable/26991047>

Zymová, K. (2024). *Democracy is hot. Or not? Examining the link between political dissatisfaction and democratic support in European democracies*. *Democratization*, 31(6), 1297–131